

PEMETAAN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN SEBAGAI TAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA KEDIRI

Suwarno

suwarno@unik-kediri.ac.id

Rizki Yudha Bramantyo

Rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi problem setiap manusia, masyarakat, daerah, bahkan setiap negara di dunia. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan juga menjadi program setiap daerah dan negara di dunia tersebut. Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia memiliki andil dalam terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan lingkungan sebagai upaya untuk melakukan pemetaan kemiskinan, inventarisir penyebab kemiskinan dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif menjadi opsi untuk dapat menjawab tujuan tersebut, mengingat pendekatan penelitian kualitatif dapat menggali data sampai mendalam baik secara personal maupun kelembagaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diuji dengan uji validasi data dan hasilnya dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, Kemiskinan wilayah perkotaan: terdapat 7 (tujuh) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu: (1) motivasi kerja yang rendah, (2) kurangnya kreatifitas, (3) rendahnya inisiatif, (4) kurangnya kepemilikan aset untuk memproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.

Kedua, Kemiskinan Wilayah Pinggiran Kota: terdapat 9 (sembilan) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : (1) rendahnya kreatifitas, (2) Besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, (3) rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, (4) kepemilikan aset untuk memproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) kepuasan,(7) pola konsumsi, dan (8) besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan (9) pendidikan yang rendah.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pendekatan Lingkungan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu kita jumpai adanya heterogenitas baik itu secara agama, pendidikan, mata pencaharian, bentuk bangunan dan jabatan. Kondisi demikian berdampak pada kondisi ekonomi atau kesejahteraan mereka yang juga tidak sama, ada yang kaya, cukup mampu, maupun yang miskin. Biasanya dikatakan miskin atau tidak hanya didasarkan sudut pandang

ekonomi saja. Disamping itu kemiskinan, bukan saja menjadi isu nasional, melainkan menjadi isu global bagi negara-negara berkembang

Berdasarkan sudut pandang kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. maka konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Perbedaan kepemilikan materi tersebut diperkuat pula oleh perbedaan pendapatan yang menyebabkan perbedaan status sosial (kaya dan miskin). Hal tersebut menyebabkan pula ada kelompok dalam masyarakat yang tidak berdaya untuk ikut menikmati ataupun memanfaatkan berbagai akses ataupun fasilitas pemerintah karena faktor ketidakberdayaan ekonomi.

Namun demikian jika didasarkan pada faktor ketidakmampuan untuk memperoleh akses dan menikmati aspek nilai moral, nilai ekonomi, nilai seni, dan nilai sains, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan budaya dan kemiskinan struktural. Kemiskinan budaya disebut juga miskin yang disebabkan oleh akibat adanya pengalaman hidup. Adapun kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Pada umumnya kemiskinan yang terjadi di masyarakat, kedua status kemiskinan tersebut menjadi satu baik kemiskinan absolut maupun relatif ataupun kemiskinan budaya maupun struktural. Mengapa demikian?, sebab faktor pendapatan atau penghasilan tersebut menentukan keberhasilan untuk dapat menikmati berbagai aspek baik itu faktor ekonomi, sosial, budaya maupun kebutuhan lain. Oleh karena itu banyak program pemerintah yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.

Banyak program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi atau menanggulangi kemiskinan. Mengingat hasil pembangunan juga bertujuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Melalui penciptaan lapangan kerja tersebut bisa mengurangi pengangguran. Melalui pekerjaan tersebut dapat diperoleh penghasilan yang dapat menghidupi keluarga dan keperluan keluarga serta pendidikan. Demikian juga yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri dalam upayanya untuk mengurangi masyarakat miskin. Di samping berbagai upaya pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, pemerintah juga menerapkan berbagai pendekatan.

Isu-isu kemiskinan yang dihembuskan dalam program-program kemiskinan di Indonesia masuk pada babak integrasi atas seluruh program-program yang telah dicanangkan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009. Oleh sebab itu, seluruh *stakeholder* pemerintah membangun *trust* masyarakat dengan berbagai macam program yang bersifat *charity* ataupun pemberdayaan. Program *charity* yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu (TNP2K,2018). Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan lingkungan sebagai upaya untuk menjadi solusi

dalam melakukan pemetaan kemiskinan, inventarisir penyebab kemiskinan dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*), (World Bank, 2006). Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (makanan, pakaian dan rumah). Adapun menurut Friedman, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.

Sesuai dengan amanah Undang- undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Upaya untuk mencapai hal tersebut dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan materiil, spirituil serta mampu mengembangkan dirinya agar dapat melaksanakan fungsi sosial (pasal 1). Kemiskinan tidak tercipta dengan sendirinya, namun terdapat beberapa faktor yang memberikan kontribusi, antara lain faktor manusia, bumi (planet), kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Budaya kemiskinan dibangun atas dasar asumsi bahwa orang miskin maupun orang kaya memiliki pola nilai, kepercayaan, dan norma perilaku yang berbeda (Mandell & Schram, 2003). Faktor budaya dan lingkungan memiliki kecenderungan membentuk pola kemiskinan atau kesuksesan seseorang dalam satu kelompok masyarakat. Kemiskinan juga bisa terbentuk karena faktor keturunan keluarga miskin dari generasi ke generasi yang tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Padahal melalui perjuangan hidup, keuletan, kerja keras dan faktor nasib orang miskin bisa berubah menjadi kaya. (Mandell & Schram, 2003). Bahkan pandangan struktural fungsional menjelaskan konsepnya bahwa masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan, hal ini disebabkan oleh adanya struktur ekonomi dan sosial menjadi penyebab kemiskinan. Kondisi ini mendorong orang untuk memiliki *skill* dan keterampilan lebih untuk keluar dari lingkaran tersebut. *Skill* dan berbagai keterampilan lebih tersebut sangat diperlukan agar mampu menghadapi persaingan pasar. Sebagaimana Beeghley (2000) menjelaskan bahwa pengaruh struktur ekonomi tidak terlepas dari usaha individu seperti kerja keras dan memiliki keterampilan.

Disisi lain (Gans, 1995) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang paling penting dalam menjalankan fungsi sosial di masyarakat seperti halnya dengan “ekonomi dan politik” masyarakat lintas kelas yakni masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Interaksi masyarakat antar kelas tersebut merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang mampu menggerakkan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat di masing-masing kelas. Berbagai usaha produktif dari masyarakat golongan menengah dan kaya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dari masyarakat miskin, mereka bekerja sebagai buruh atau karyawan pada berbagai usaha produktif tersebut.

Sementara itu si buruh sangat memerlukan pekerjaan tersebut untuk

memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Namun demikian, kemiskinan dari para buruh tersebut dapat terkikis melalui peningkatan upah para tenaga kerja. Kenaikan tenaga kerja tidak akan meningkat tanpa adanya peningkatan keterampilan ataupun keahlian. Keterampilan dan keahlian tidak akan diperoleh tanpa pelatihan dan atau pendidikan. Jadi hanya melalui pendidikan dan pelatihan dan didukung kerja keras saja yang dapat meningkatkan penghasilan dan menghapuskan kemiskinan (Hurst, 2004).

Namun mengenai upah tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Hurst, 2004). Dalam sistem ekonomi *capital*, uang yang dimiliki oleh pemilik modal dapat mengontrol distribusi tenaga kerja melalui sistem pemberian *reward* (Calhoun et al, 2010). Jika demikian adanya maka hal tersebut dapat menimbulkan gesekan antar pekerja untuk berkompetisi mencapai penghasilan lebih guna dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Kondisi ini, disebutkan oleh Hurst (2004) membutuhkan tanggungan negara agar dapat menengahi keberadaan pasar yang dikuasai oleh pemilik modal dengan pekerja yang menguasai keterampilan dalam memproduksi produk-produk yang dihasilkan atas dasar kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu pengentasan ataupun pengendalian kemiskinan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun bukan berarti pengusaha tidak merasa terlibat. Mengingat apapun yang terjadi dengan masyarakat dan hal tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab personal, pengusaha dan pemerintah. Masing-masing komponen bisa menyusun rencana yang kemudian dipertemukan menjadi program yang siap untuk dilaksanakan guna untuk dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan upah atau penghasilan. Program dan pelaksanaan pembangunan sampai saat ini masih efektif menjadi bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan personel. Ketiga komponen tersebut hendaknya dapat bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah dengan kewenangannya dapat mengeluarkan berbagai regulasi, mengatur upah, reward, libur dan lain sebagainya. Namun pengusaha yang melaksanakan berbagai regulasi tersebut, dan masyarakat harus bekerja keras sesuai dengan *job discription* nya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengkaji pendekatan lingkungan budaya sebagai bentuk program alternatif dari pemerintah guna untuk mengkaji keberadaan lingkungan budaya guna untuk mengendalikan kemiskinan hanya sesuai dan cukup proporsional dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memang mengedepankan survey dan wawancara untuk memperoleh data penelitian yang selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis interaktif.

Pendekatan yang digunakan untuk menentukan informan kunci dengan teknik purposif sampling, mengingat daerah penelitian merupakan daerah sendiri yang cukup diketahui berbagai masalah kemiskinan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut saling melengkapi dalam hal pengumpulan

data. Data yang telah diperoleh kemudian diuji validitasnya dengan teknik uji keabsahan data (triangulasi data). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis SWOT.

Pendekatan pemecahan masalah kemiskinan di kota Kediri menggunakan pendekatan lingkungan tersebut digunakan dengan alasan bahwa setiap masyarakat tinggal di suatu lingkungan, baik fisik maupun sosial yang keduanya saling berpengaruh dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ada lingkungan alam yang subur, banyak sumber daya hayati dan sumber daya alam, namun ada juga mereka hidup di lingkungan yang kurang di dukung oleh kondisi sumber daya alam yang tandus. Oleh karena itu setiap daerah memiliki data pendukung dan kondisi yang melemahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis kota Kediri berada pada daerah dataran rendah yang dibelah oleh aliran sungai Brantas. Sebelah timur sungai Brantas daerah sangat subur dan memiliki jenis batuan dan tanah yang berbeda dengan sebelah barat sungai. Sebelah timur tanahnya didominasi oleh batuan pasir yang berasal dari letusan Gunung Kelut. Adapaun sebelah barat sungai Brantas tanahnya berlempung. Perbedaan jenis batuan dan tanah tersebut menghasilkan tingkat kesuburan yang berbeda dan kualitas maupun kuantitas pertanian yang berbeda.

Kota Kediri sendiri berlokasi di daerah dataran banjir sungai Brantas, wilayah timur sungai memiliki kemiringan dari timur ke barat, dan wilayah barat sungai memiliki kemiringan dari barat ke timur. Semua ini miring menuju ke sungai Brantas. Oleh karena itu secara hidrologi semua aliran sungai yang berada di wilayah barat sungai Brantas mengalir ke timur dan dari daerah timur sungai mengalir ke barat.

Secara administrasi kota Kediri dibatasi oleh sebelah utara Kecamatan Gurah, sebelah timur Kecamatan Wates, sebelah barat Kecamatan Semen, dan Kecamatan Gringing, dan sebelah selatan Kecamatan Ngadiluwih. Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km², secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km² terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 14,9 km², dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km² terdiri dari 15 Kelurahan.

Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah (kota) berdasarkan UU No. 12/1950. Jika mengacu pada UU tentang pembentukan Pemerintah Kota Kediri tersebut, saat ini Kota Kediri berumur 70 tahun. Kota Kediri terdiri atas tiga kecamatan dan 46 kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, dan Kecamatan Pesantren. Pada 2019 wilayah administratif tiga kecamatan ini terdiri atas 85 lingkungan, 330 RW dan 1.478 RT. Dalam hal ini, Kecamatan Kota meliputi 17 kelurahan, 20 lingkungan, 101 RW, dan 489 RT. Berikutnya, Kecamatan Pesantren. Kecamatan ini membawahi 15 kelurahan, 29 lingkungan, 129 RW, dan 496 RT. Berbeda dengan dua kecamatan tetangganya, Kecamatan Mojoroto meliputi 14 kelurahan, 36 lingkungan, 100 RW, dan 486 RT. Kota Kediri dengan sapaan populer Kota Tahu

memiliki semboyan gagah perkasa. Djojo ing Bojo. Semboyan ini memiliki makna "Mengalahkan Marabahaya".

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *Staasblad* (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. Gemeente ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai *Gemeente Raad* (Dewan Kota/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (*Europeanen*), empat orang Pribumi (*Inlanders*) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan *Staasblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "*Zelfstanding Gemeenteschap*" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Pada tahun 2018 Jumlah penduduk miskin Kota Kediri sebesar 21.900 jiwa atau mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 2.170 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin kota Kediri kembali mengalami penurunan sebanyak 1.360 jiwa menjadi 20.540 jiwa.

Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebut bahwa penurunan angka kemiskinan ini tak lepas dari kolaborasi semua pihak. "Kemiskinan kita dari dulu tetap di angka 8. Alhamdulillah sekarang bisa turun menjadi 7,68. Tentu dalam hal ini program apa saja yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan ini yang akan kami alami," ujarnya. Menurutnya, pemerintah sudah mempunyai poin-poin indikator. Serta warga mana saja yang harus diberikan program dalam pengentasan kemiskinan. Maka dengan hal tersebut pemkot bisa menindaklanjutinya secara tepat sasaran.

Menyadari bahwa setiap daerah sudah pasti dijumpai masyarakat yang kurang berhasil atau masyarakat miskin, demikian juga dengan kota Kediri. Kita tinggal disuatu lingkungan, baik itu lingkungan fisik, sosial maupun budaya. Lingkungan fisik ditandai oleh daerah pegunungan, dataran, rawa, dataran tinggi, persawahan, hutan, danau dan sebagainya. Adapun lingkungan sosial budaya itu sendiri tercipta dari peradaban manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya.

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (file.upi.edu>Direktori>FPIPS). Lingkungan itu sendiri secara garis besar dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal organisasi itu sendiri.

Setiap komponen pengentas kemiskinan dalam penyusunan rencana pengentasan, maupun penanggulangan kemiskinan hendaknya juga harus selalu memperhatikan faktor kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam lingkungannya, disamping tentunya faktor eksternal. Setelah diketahui indikator kelemahan dan kekuatan faktor internal tersebut maka langkah selanjutnya adalah

harus dilakukan analisis terhadap kedua faktor tersebut. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat fakta bahwa faktor identifikasi kekuatan dan suatu organisasi atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel yakni kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut. Faktor eksternal merupakan sesuatu yang berujud peluang dan hambatan dari luar, karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain.

Tujuan dilakukan analisis lingkungan ini adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, selain itu agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap proyek perubahan.

Hal tersebut juga dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk mensukseskan organisasi termasuk pelaksanaan proyek perubahan. Lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Hasil identifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal selanjutnya dianalisis dengan metode SWOT, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan untuk tiap wilayah di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Pertama, Kemiskinan wilayah perkotaan: terdapat 8 (delapan) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu: (1) motivasi kerja yang rendah, (2) kurangnya kreatifitas, (3) rendahnya inisiatif, (4) kurangnya kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.

Kedua, Kemiskinan Wilayah Pinggiran Kota: terdapat 9 (Sembilan) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : (1) rendahnya kreatifitas, (2) Besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, (3) rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, (4) kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) kepuasan,(7) pola konsumsi,dan (8) besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan (9) pendidikan yang rendah.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada penduduk/ keluarga miskin yang harus diatasi/diperbaiki untuk masing-masing wilayah adalah:

- a. Wilayah Perkotaan: (1) kepemilikan aset untuk berproduksi (2) daya beli, (3) pola Konsumsi, dan (4) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya, (5) pendidikan.
- b. Wilayah Pinggiran kota: (1) pendidikan dan keterampilan, (2) kepemilikan aset untuk berproduksi, (3) daya beli, (4) lamanya bekerja, (5) kepuasan hidup, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.

KESIMPULAN

- a. Program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri diawali dengan pendataan atau inventarisir, melakukan pemetaan melalui pendekatan lingkungan.
- b. Perlu partisipasi swasta dalam pelaksanaan pemetaan dengan pendekatan lingkungan.
- c. Perlu adanya aturan yang tegas mengenai penanggulangan kemiskinan;

SARAN

- a. Disarankan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD sebaiknya membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kediri.
- b. Pembentukan tim efektif yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Beeghley, L. 2000. The Structure of social stratification in the United States. New York, NY: Pearson. Bell, J.D., Kronen, M., Vunisea, A., Nash, W., Keeble, G
- Calhoun, J.F., and Acocella, J.R. 2010. Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan (Terjemahan oleh Satmoko, R.S.) edisi ketiga. Semarang : Penerbit IKIP Semarang
- Gan, V. H. S., 1995, Farmakologi dan Terapi, Edisi keempat, 571-.oleh MB NISA · 2007
- Hurst, C. (2004). *Social inequality: Forms, causes and consequences*. New York, NY: Person Education Inc.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan.
- Lewis, Oscar. 1966. Kebudayaan Kemiskinan, Dalam Parsudi Suparlan (ed.),Kemiskinan di Perkotaan.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Mandell LA, Bartlett JG, Dowell SF, File TM Jr, Musher DM, Whitney C; Infectious Diseases Society of America. Update of practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults.Clin Infect Dis.2003;37:1405-1433
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia diakses melalui <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Ikhtisar-Laporan-BD-ttgKemiskinan-di-Indonesia.p>
- <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>
- <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/01/08/112361/kemiskinan-kota-kediri-turun-pengaruh-stabilitas-inflasi-daerah>